



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

**PENETAPAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan'
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
6. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Sintang,
Pada tanggal : 19 April 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG SELAKU PPID UTAMA
KABUPATEN SINTANG**



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740323 199803 1 005

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sintang;
2. Wakil Bupati Sintang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sintang;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sintang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sintang;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

LAMPIRAN
 PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SINTANG SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN
 SINTANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
2.	Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	a. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi proses penyediaan jasa yang terbaik dalam rencana pembangunan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang/jasa
3.	Draf Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
4.	Konfigurasi Database Dan Aplikasi Serta Username Dan Password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat membahayakan keamanan badan publik		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Tahun 2022	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa
6.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual- Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
7.	Data Penyandang HIV/AIDS Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindung data pribadi	
8.	Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i-UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
9.	Data Hasil Check Up Kesehatan Perorangan Pejabat Pemda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan rahasia pribadi seorang Pejabat	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pejabat yang bersangkutan
10.	Berita/Radiogram rahasia Pemda kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
11.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon penerima beasiswa kedokteran UNTAN Pontianak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Proses pertimbangan jabatan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia jabatan seorang	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai dengan dikeluarkannya SK Jabatan PNS yang bersangkutan
13.	Pembinaan dan sanksi Hukuman Disiplin bagi PNS Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
14.	Data Pribadi Penduduk Kabupaten Sintang	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, b. Pasal 17 huruf i;-UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai terbitnya Keputusan yang lebih tinggi (Pusat) tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk.
15.	Data terkait gaji/penghasilan pegawai/ASN dinas Lingkungan Hidup yang mengajukan pinjaman Bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
16.	Data terkait hasil temuan laporan keuangan institusi pemeriksa tahun 2022	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai terbitnya laporan yang telah diaudit
17.	Data terkait kebijakan pimpinan	UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 17, UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pimpinan	Mendukung kebijakan pimpinan	Selama berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Laporan hasil penilaian harga tanah dari pihak penyedia jasa penilaian (konsultan)	PP 16 Tahun 2018			Sampai selesai audit/pemeriksaan
19.	Dokumen perencanaan tata ruang	UU Nomor 26 Tahun 2007 UU Nomor 11 Tahun 2021			Sampai diundangkan dalam lembaran daerah
20.	Laporan Keuangan pada tahun berjalan	UU Nomor 17 Tahun 2003			Sampai selesai audit/pemeriksaan
21.	Biodata penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Potensi Penyalahgunaan Data Penduduk	Data penduduk terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
22.	Database ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Dokumen/Arsip ASN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
24.	Daftar keuangan dan pendapatan/rekening pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
25.	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dengan adanya pengungkapan akan mempengaruhi proses penyusunan dan penetapan kebijakan	Menjaga iklim/ suasana kondusif di lingkungan kerja	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
26.	Internet protokol/IP Address private, akun dan sandi pengguna dan pengelola SIAK	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
27.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
28.	Biodata Elektronik PNS (<i>Database</i>)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
30.	Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan /rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
31.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
32.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
33.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa
34.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tindakan Kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas
35.	<i>Bandwidth Management</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar peruntukan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	Tidak Terbatas
36.	Sistem Manajemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data Base	Tidak Terbatas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	Data Nominatif Guru dan Tenaga Kependidikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
38.	Surat usulan formasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 11 Tahun 2017 - PP No. 49 Tahun 2018 	Dapat terjadi protes ketidakpuasan dari masyarakat atas informasi	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat keputusan	Terbatas sampai dengan diterbitkannya pengumuman bupati
39.	Kode Akses sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Tidak terbatas
40.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	Peraturan BKN No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat mutasi, menjaga suasana kerja yang kondusif	Terbatas samapai denagn surat mutasi di berikan
41.	Proses pertimbangan jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3 	Akan dapat menimbulkan protes dari PNS yang akan diangkat dalam jabatan	Dapat menjaga putusan pimpinan sampai terbitnya SK dan pejabat tersebut dilantik	Terbatas sampai dengan saat telah dilaksanakan pelantikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42.	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN - PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS - PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS 	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin merupakan hukuman dari perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, yang bersifat keputusan pejabat pembina kepegawaian adalah dokumen negara yang tidak bisa di buka untuk umum, apabila dibuka identitas yang bersangkutan akan berdampak pada pelanggaran kode etik	Untuk melindungi data pribadi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang bersifat rahasia	
43.	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karna pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karna data pasien dirahasiakan	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	Data pasien HIV AIDS by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
45.	Data Pasien Covid-19 by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
46.	Data Base Penggajian ASN	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu.	Untuk Pengamanan Data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
47.	Surat Perintah Pencairan Dana	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu.	Untuk Pengamanan Data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48.	Rekening Koran	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk Pengamanan Data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
49.	Data ASN Pejabat Daerah yang telah ditetapkan TPTGR	Pasal 14 Undang-undang KIP	- Mengungkap Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan. - Data Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu.	Menjaga Rahasia Yang Bersangkutan	±30 Tahun
50.	Password dan User Aplikasi Keuangan	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Data Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu.	Menjaga Kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan Ijin Dari Bupati Sintang
51.	Dokumen Kepemilikan Aset Daerah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Data Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu.	Menjaga Kerahasiaan Informasi Kepemilikan Aset Daerah	Sampai mendapatkan Ijin Dari Bupati Sintang

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
SELAMAT PPD 19740323 199803 1 005 KABUPATEN SINTANG



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sintang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
2.	Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	a. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi proses penyediaan jasa yang terbaik dalam rencana pembangunan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang/jasa
3.	Draf Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
4.	Konfigurasi Database Dan Aplikasi Serta Username Dan Password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat membahayakan keamanan badan publik		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Tahun 2022	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa
6.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual- Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual- Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
7.	Data Penyandang HIV/AIDS Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi	
8.	Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i-UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
9.	Data Hasil Check Up Kesehatan Perorangan Pejabat Pemda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pejabat	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pejabat yang bersangkutan
10.	Berita/Radiogram rahasia Pemda kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
11.	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon penerima beasiswa kedokteran UNTAN Pontianak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Proses pertimbangan jabatan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia jabatan seorang	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai dengan dikeluarkannya SK Jabatan PNS yang bersangkutan
13.	Pembinaan dan sanksi Hukuman Disiplin bagi PNS Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
14.	Data Pribadi Penduduk Kabupaten Sintang	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, b. Pasal 17 huruf i;-UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai terbitnya Keputusan yang lebih tinggi (Pusat) tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk.
15.	Data terkait gaji/penghasilan pegawai/ASN dinas Lingkungan Hidup yang mengajukan pinjaman Bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
16.	Data terkait hasil temuan laporan keuangan institusi pemeriksa tahun 2022	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai terbitnya laporan yang telah diaudit
17.	Data terkait kebijakan pimpinan	UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 17, UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pimpinan	Mendukung kebijakan pimpinan	Selama berlaku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Laporan hasil penilaian harga tanah dari pihak penyedia jasa penilaian (konsultan)	PP 16 Tahun 2018			Sampai selesai audit/pemeriksaan
19.	Dokumen perencanaan tata ruang	UU Nomor 26 Tahun 2007 UU Nomor 11 Tahun 2021			Sampai diundangkan dalam lembaran daerah
20.	Laporan Keuangan pada tahun berjalan	UU Nomor 17 Tahun 2003			Sampai selesai audit/pemeriksaan
21.	Biodata penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Potensi Penyalahgunaan Data Penduduk	Data penduduk terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
22.	Database ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	Dokumen/Arsip ASN	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
24.	Daftar keuangan dan pendapatan/rekening pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
25.	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dengan adanya pengungkapan akan mempengaruhi proses penyusunan dan penetapan kebijakan	Menjaga iklim/ suasana kondusif di lingkungan kerja	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
26.	Internet protokol/IP Address private, akun dan sandi pengguna dan pengelola SIAK	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
27.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
28.	Biodata Elektronik PNS (Database)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
30.	Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan /rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
31.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
32.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
33.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa
34.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tindakan Kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas
35.	<i>Bandwidth Management</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar peruntukan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	Tidak Terbatas
36.	Sistem Manajemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data Base	Tidak Terbatas

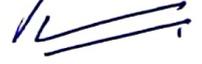
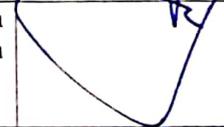
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37.	Data Nominatif Guru dan Tenaga Kependidikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
38.	Surat usulan formasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 11 Tahun 2017 - PP No. 49 Tahun 2018 	Dapat terjadi protes ketidakpuasan dari masyarakat atas informasi	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat keputusan	Terbatas sampai dengan diterbitkannya pengumuman bupati
39.	Kode Akses sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 tahun 2008 dirubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Tidak terbatas
40.	Nota Dinas Usulan Mutasi PNS	Peraturan BKN No. 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi PNS	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat mutasi, menjaga suasana kerja yang kondusif	Terbatas samapai denagn surat mutasi di berikan
41.	Proses pertimbangan jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3 	Akan dapat menimbulkan protes dari PNS yang akan diangkat dalam jabatan	Dapat menjaga putusan pimpinan sampai terbitnya SK dan pejabat tersebut dilantik	Terbatas sampai dengan saat telah dilaksanakan pelantikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42.	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN - PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS - PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS 	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin merupakan hukuman dari perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, yang bersifat keputusan pejabat pembina kepegawaian adalah dokumen negara yang tidak bisa di buka untuk umum, apabila dibuka identitas yang bersangkutan akan berdampak pada pelanggaran kode etik	Untuk melindungi data pribadi seseorang yang dilindungi oleh undang-undang bersifat rahasia	
43.	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karna pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karna data pasien dirahasiakan	5 Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	Data pasien HIV AIDS by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
45.	Data Pasien Covid-19 by name by address	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan factor social lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
46.	Data Base Penggajian ASN	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu.	Untuk Pengamanan Data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
47.	Surat Perintah Pencairan Dana	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu.	Untuk Pengamanan Data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48.	Rekening Koran	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk Pengamanan Data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
49.	Data ASN Pejabat Daerah yang telah ditetapkan TPTGR	Pasal 14 Undang-undang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan. - Data Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu. 	Menjaga Rahasia Yang Bersangkutan	±30 Tahun
50.	Password dan User Aplikasi Keuangan	Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Data Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu.	Menjaga Kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan Ijin Dari Bupati Sintang
51.	Dokumen Kepemilikan Aset Daerah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Data Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu.	Menjaga Kerahasiaan Informasi Kepemilikan Aset Daerah	Sampai mendapatkan Ijin Dari Bupati Sintang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	WITARSO, SH., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Selaku PPID Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang	
2.	dr. HARYSINTO LINOH, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Selaku PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	
3.	NETTY VIKTORIA, SE, MM	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Selaku PPID Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	
4.	BRIGITA DWI WIDI JULIANDARI, S.Hut., M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang Selaku PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang	Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang	
5.	Drs. SRI TANYONO TH, M. Si	Kepala Bidang Pelayanan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Selaku PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	
6.	MURJANI, S.Pd.SD., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Selaku PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740323 199803 1 005